



**LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER II TAHUN 2018
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**



Jakarta Kota Maju, Lestari, dan
Berbudaya Yang Warganya Terlibat
Dalam Mewujudkan Keberadaban,
Keadilan, dan Kesejahteraan Bagi
Semua

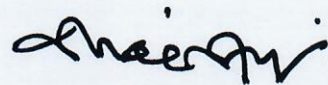
KATA PENGANTAR

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan yang berisi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas /pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta



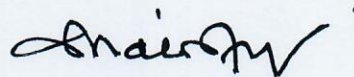
Chaidir, M. Si
NIP 196608181990031008

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Semester 2 Tahun 2018 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Chaidir, M. Si
NIP 196608181990031008

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Semester II Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di Lingkungan Pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak menganggarkan penerimaan pendapatan.

Realisasi Belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Semester II Tahun 2018 adalah sebesar Rp 149.770.900.833,00 atau mencapai 93.38% dari alokasi anggaran sebesar Rp 160.388.309.823,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 (Audited).

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.896.566.702,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 416.816.477,00, Aset Tetap sebesar Rp 3.004.126.180,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp 475.624.045,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas LO masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp (146.098.750.787,00). RK PPKD sebesar Rp 149.955.317.489,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak menganggarkan penerimaan pendapatan. Jumlah beban untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 142.260.842.930,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai

Rp 142.260.842.930,00. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak menganggarkan Kegiatan Non-Operasional.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp (3.834.460.847,00) ditambah Perubahan Ekuitas sebesar Rp 7.731.027.549,00. Sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 3.896.566.702,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis Akrua.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2018**

(dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 31 DESEMBER 2018	%	REALISASI 31 DESEMBER 2017
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	-	-	-	-	-
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
BELANJA	-				
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	B.2.1	148.545.532.000	139.269.594.365	93.76	113.869.532.723
Belanja Barang& Jasa	B.2.2	9.594.309.972	8.449.102.188	88.06	7.089.341.675
Jumlah Belanja Operasi		158.139.841.972	147.718.696.553	93.41	120.958.874.398
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah		-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.3	2.248.467.851	2.052.204.280	91.27	552.033.507
Belanja Gedung dan Bangunan		-	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-
Belanja Aset Lainnya		-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		2.248.467.851	2.052.204.280	91.27	552.033.507
					-
JUMLAH BELANJA		160.388.309.823	147.770.900.833	93.38	121.510.907.905
SURPLUS/DEFISIT		(160.388.309.823)	(147.770.900.833)	93.38	(121.510.907.905)

II. N E R A C A
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NERACA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	CATA TAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)
		31-Des-18	31-Des-17	JUMLAH
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-	-
Beban Dibayar Dimuka	C.1.2	267.629	-	267.629
Persediaan	C.1.3	416.548.848	402.013.477	14.535.371
Jumlah Aset Lancar		416.816.477	402.013.477	14.803.000
ASET TETAP				
Tanah		-	-	-
Peralatan dan Mesin	C.2.1	10.560.343.878	8.859.955.009	1.700.388.869
Gedung dan Bangunan		-	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-
Aset Tetap Lainnya		-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-	-
Akumulasi Penyusutan	C.2.2	(7.556.217.698)	(6.592.130.137)	(964.087.561)
Jumlah Aset Tetap		3.004.126.180	2.267.824.872	736.301.308
ASET LAINNYA				
Aset lain-lain	C.3.1	1.704.423.502	1.214.421.541	490.001.961
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	C.3.2	(1.228.799.457)	(739.230.896)	(489.568.561)
Jumlah Aset Lainnya		475.624.045	475.190.645	433.400
JUMLAH ASET		3.896.566.702	3.145.028.994	751.537.708
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-	-	-
Utang Belanja	C.4.1	-	6.979.489.841	(6.979.489.841)
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	6.979.489.841	(6.979.489.841)
JUMLAH KEWAJIBAN		-	6.979.489.841	(6.979.489.841)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas – LO		(146.098.750.787)	(3.834.460.847)	(142.264.289.940)
RK PPKD		149.995.317.489	-	149.995.317.489
Jumlah Ekuitas	C.5.1	3.896.566.702	(3.834.460.874)	7.731.027.549
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.896.566.702	3.145.028.994	751.537.708
		-	-	-

III. LAPORAN OPERASIONAL
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL	-		
PENDAPATAN	-	-	-
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah		-	-
Pendapatan Retribusi Daerah		-	-
Lain-lain PAD yang sah		-	-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		-	-
		-	-
JUMLAH PENDAPATAN			
Jumlah		-	-
BEBAN	-		
BEBAN OPERASI			
Beban Pegawai	D.1	132.290.104.524	118.432.580.994
Beban Persediaan	D.2	738.233.938	620.746.461
Beban Barang	D.3	1.504.222.410	983.560.950
Beban Jasa	D.4	6.168.336.500	5.485.993.500
Beban Pemeliharaan	D.5	48.906.000	41.734.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.6	1.511.039.558	1.198.711.597
Jumlah Beban Operasi		142.260.842.930	126.763.327.502
JUMLAH BEBAN		142.260.842.930	126.763.327.502
SURPLUS/DEFISIT - LO		(142.260.842.930)	(126.763.327.502)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
1	2	3	4
Ekuitas - LO		(3.834.460.847)	1.375.080.059
RK PPKD		-	-
Jumlah Ekuitas Awal	E.1	(3.834.460.847)	1.375.080.059
Surplus/Defisit LO		(142.260.842.930)	(126.763.327.502)
Mutasi RK PPKD		167.784.803.961	121.553.786.596
Koreksi Ekuitas		(3.447.010)	-
Perubahan Ekuitas	E.2	7.731.027.549	(5.209.540.906)
Ekuitas Akhir:			
Ekuitas - LO		(146.098.750.787)	(125.388.247.443)
RK PPKD		149.995.317.489	121.553.786.596
JUMLAH EKUITAS AKHIR	E.3	3.896.566.702	(3.834.460.847)

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah, yang tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten pemerintah.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 256 Tahun 2016 dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 124 Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian daerah, BKD berfungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Badan Kepegawaian Daerah;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, disiplin serta pemberhentian pegawai;
- d. Penyusunan formasi kebutuhan pegawai;
- e. Pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon pegawai;
- f. Pelaksanaan penempatan dan mutasi pegawai;
- g. Pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai;
- h. Pembinaan dan pengembangan kinerja pegawai;
- i. Pengembangan karir pegawai;
- j. Penyelenggaraan penilaian/ pengujian dalam rangka deskripsi manajerial (*soft competency*) dan potensi pegawai;
- k. Pelaksanaan konseling pegawai;
- l. Penyusunan dan validasi alat ukur uji kompetensi manajerial (*soft competency*);
- m. Penyusunan standar kompetensi manajerial (*soft competency*);
- n. Pelayanan, pembinaan dan pengembangan kesejahteraan pegawai;
- o. Penyelesaian administrasi pemberhentian dan pensiun pegawai;
- p. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian;
- q. Pengelolaan sistem informasi manajemen dan dokumen kepegawaian daerah;
- r. Pengelolaan dan penyajian data informasi kepegawaian daerah;
- s. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;

- t. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Badan Kepegawaian Daerah;
- u. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan Kepegawaian Daerah;
- v. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan Kepegawaian Daerah; dan
- w. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan.

A.3. Basis Akuntansi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan saat memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konversi-konversi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan entitas pelaporan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada kas daerah
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan harga pembelian.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap tanah, konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaat.

d. Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam menyajikan laporan keuangan.

Pertama, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual.

Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015 merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI KEUANGAN

B.1. Pendapatan

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak menganggarkan penerimaan pendapatan.

B.2. Belanja

Realisasi belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Semester II Tahun 2018 adalah sebesar Rp 149.770.900.833,- atau 93.38% dari Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp 160.388.309.823,-

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 139.269.594.365,- meningkat Rp 25.400.061.642,- atau 22.30% dibandingkan belanja pegawai pada 31 Desember 2017 sebesar Rp 113.869.532.723,-. Hal ini disebabkan adanya kenaikan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja-Jaminan Kematian (JKK-JKM) yang disetorkan kepada PT. Taspen.

Rincian realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 1
Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	REALISASI BELANJA PEGAWAI		NAIK / TURUN	
	31 Des 2018	31 Des 2017	Rp.	%
BELANJA PEGAWAI	139.269.594.365	113.869.532.723	25.400.061.642	22.30
Gaji Pokok	12.490.623.200	12.615.852.220	(125.229.020)	(0.99)
Tunjangan Keluarga	1.120.365.108	1.046.227.878	74.137.230	7.08
Tunjangan Jabatan	536.850.000	528.970.000	7.880.000	1.49
Tunjangan Fungsional	142.148.000	113.832.000	28.316.000	24.87
Tunjangan Umum	540.060.000	508.195.000	31.865.000	6.27
Tunjangan Khusus (PPH)	10.736.256.923	9.292.407.360	1.443.849.563	15.54
Tunjangan Beras	634.037.100	641.351.520	(7.314.420)	(1.14)
Pembulatan Gaji	160.612	156.283	4.329	2.77
Tunjangan Kinerja	76.228.924.036	71.428.849.539	4.800.074.497	6.72
Iuran JKK – JKM	34.121.194.386	14.909.605.123	19.211.589.263	128.85
Biaya Kematian PNS DKI	-	224.305.800	(224.305.800)	(100)
Tunjangan Transport Pejabat	2.718.975.000	2.559.780.000	159.195.000	6.22

B.2.2. Belanja Barang& Jasa

Realisasi Belanja Barang & Jasa pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp8.449.102.188,- dan Rp 7.089.341.675,-. Kenaikan Realisasi Belanja Barang & Jasa sebesar Rp1.359.760.513,- atau 19.18% antara lain disebabkan kenaikan belanja Makanan dan Minuman serta kenaikan belanja tenaga ahli.

Rincian realisasi Belanja Barang pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2
Perbandingan Realisasi Belanja Barang pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	REALISASI BELANJA PEGAWAI		NAIK / TURUN	
	31 Des 2018	31 Des 2017	Rp.	%
BELANJA BARANG	8.449.102.188	7.089.341.675	1.359.760.513	19.18
Belanja Bahan Pakai Habis	629.801.720	430.648.825	199.152.895	46.24
Belanja Bahan/Material	10.472.018	-	10.472.018	100
Belanja Jasa Kantor	8.964.000	8.892.000	72.000	0.81
Belanja Cetak dan Penggandaan	129.835.900	154.507.700	(24.671.800)	(15.97)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.850.000	-	3.850.000	100
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	166.960.000	111.320.000	55.640.000	49.98
Belanja Makanan dan Minuman	1.461.750.050	976.457.650	485.292.400	49.70
Belanja Pemeliharaan	48.906.000	41.734.000	7.172.000	17.19
Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	5.988.562.500	5.365.781.500	622.781.000	11.61

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp 2.052.204.280,- dan Rp 522.033.507,-. Terdapat peningkatan belanja modal sebesar Rp 1.530.170.773,- atau 293.11% yang disebabkan oleh peningkatan belanja mebeulair yang pada tahun 2018 terdapat pengadaan *work-station* bagi pegawai BKD Provinsi DKI Jakarta. Rincian realisasi belanja Modal pada 31 Desember 2018 dan 2017 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Pada 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI BELANJA MODAL		NAIK / TURUN	
	31 Des 2018	31 Des 2017	Rp.	%
BELANJA MODAL	2.052.204.280	522.033.507	1.530.170.773	293.11
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Khusus	-	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	-	79.178.000	(79.178.000)	(100)
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	89.375.000	108.580.000	(19.205.000)	(17.69)
Belanja Modal Pengadaan Komputer	500.394.950	-	500.394.950	100
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.435.925.430	260.038.187	1.175.887.243	452.20
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan	22.000.000	-	22.000.000	100
Belanja Modal Pengadaan CCTV	-	29.987.320	(29.987.320)	(100)
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Teknologi Informasi	4.508.900	74.250.000	(69.741.100)	(93.93)

C. PENJELASAN ATAS POS – POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp 416.816.477,- dan Rp 402.013.477,-. Aset lancar merupakan Aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 4
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

NO	ASET LANCAR	31 Des 2018	31 Des 2017
1	Kas di bendahara pengeluaran	-	-
2	Beban Dibayar Dimuka	267.629	-
3	Persediaan	416.548.848	402.013.477
Jumlah		416.816.477	402.013.477

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp 0,-, seluruh sisa kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember akan disetorkan kembali ke Kas Daerah, sehingga tidak terdapat saldo pada pos Kas di Bendahara Pengeluaran.

C.1.2. Beban Barang Dibayar Dimuka

Pada tahun 2018 terdapat beban dibayar dimuka sebesar Rp 267.629,- yaitu pos Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional yang pada tanggal 31 Desember 2018 masih terdapat sisa saldo.

C.1.3. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp 416.548.848,- dan Rp 402.013.477,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional.

C.2. Aset Tetap

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp 3.004.126.180,- dan Rp 2.267.824.872,-. Aset tetap merupakan aset berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 tersaji pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

NO	ASET LANCAR	31 Des 2018	31Des 2017
1	Tanah	-	-
2	Peralatan dan mesin	10.560.343.878	8.859.955.009
3	Gedung dan bangunan	-	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-
6	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	(7.556.217.698)	(6.592.130.137)
Jumlah		3.004.126.180	2.267.824.872

C.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp 10.560.343.878,-.Terdapat penambahan aset tetap untuk jenis barang sebagai berikut:

- a. Penerimaan 4 (empat) unit Kendaraan Dinas Operasional dari Pusat Penyimpanan Barang Daerah ke BKD Provinsi DKI Jakarta berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Corolla Altis 1,8 VAT senilai Rp 440.600.000,- sesuai BAST Nomor 10.1/-077.323 tanggal 2 Januari 2018 dan 3 (tiga) unit mobil Suzuki Ertiga Type GX AT Tahun 2018 senilai Rp.606.000.000,- sesuai BAST Nomor 3269/-077.323 tanggal 17 September 2018;
- b. Belanja Modal sebesar Rp 2.052.204.280,- yang terdiri dari Belanja Meubelair senilai Rp 1.435.925.430,- dan Belanja Peralatan Komputer senilai Rp 500.394.950,-

Terdapat pengurangan aset tetap untuk jenis barang sebagai berikut:

- a. Pengembalian 2 unit Kendaraan Dinas Operasional ke Pusat Penyimpanan Barang Daerah berupa 1 unit Nissan X-Trail 2.5 AT Tahun 2017 senilai Rp.436.095.250,- dalam kondisi baik berdasarkan BAST Nomor 1/-077.323 tanggal 2 Januari 2018 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Corolla Altis 1,8 VAT senilai Rp 440.600.000,- sesuai BAST Nomor 2/-077.323 tanggal 29 Januari 2018 ;
- b. Reklasifikasi Peralatan dan mesin menjadi aset rusak berat senilai Rp. 490.001.961,- dalam kondisi rusak berat.
- c. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Barang senilai Rp 25.399.660,-
- d. Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Barang senilai Rp 6.318.540,-

C.2.2. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp 7.556.217.698,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

C.3. Aset Lainnya

C.3.1. Aset lain-lain

Jumlah Aset Lainnya pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp 475.624.045,- dan Rp.475.190.645,- yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Nilai Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 tersaji pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Aset Lainnya
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

NO	URAIAN	31 Des 2018	31 Des 2017
1	Aset Rusak Berat	Rp 1.704.423.502	Rp1.214.421.541
2	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	Rp(1.228.799.457)	Rp(739.230.896)
Jumlah		Rp 475.624.045	Rp. 475.190.645

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018.

C.5. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp 3.896.566.702,- dan Rp(3.834.460.847,-). Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Beban Pegawai

Jumlah beban pegawai pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp 132.290.104.524,- dan Rp 118.432.580.994,-. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp 738.233.938,- dan Rp 620.746.461,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

D.3. Beban Barang

Jumlah Beban Barang pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp 1.504.222.410,- dan Rp 983.560.950,-. Beban Barang adalah konsumsi atas barang-barang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

D.4. Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp 6.168.336.500,- dan Rp 5.485.993.500,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp 48.906.000,- dan Rp 41.734.000,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

D.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp 1.511.039.558,- dan Rp 1.198.711.597,-. Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah pengakuan

atas penggunaan manfaat potensial dari aset tetap dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp(3.834.460.847) dan Rp.1.375.080.059.

E.2. Perubahan Ekuitas

Nilai Perubahan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp 7.731.027.549,- dan Rp(5.209.540.906). Pada tahun 2018 terdapat koreksi ekuitas sebesar Rp (3.447.010) yang merupakan hasil perhitungan dari koreksi pengurang pada reklasifikasi aset tetap dan aset lainnya ke ekstrakomtabel sebesar Rp 6.318.540,- dan koreksi penambah pada koreksi lebih catat aset tetap dan aset lainnya/koreksi lebih catat nilai akumulasi penyusutan dan amortisasi sebesar Rp 6,- dan pada reklasifikasi aset tetap dan aset lainnya ke ekstrakomtabel Rp 2.871.530.

E.3. Ekuitas akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp 3.896.566.702,- dan Rp.(3.834.460.847),-

F. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah satu buah rekening di Bank DKI Kantor Cabang Utama Balaikota dengan Nomor Rekening 108.02.01433.7 atas nama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9
Telepon. 021 - 382 2139 - 382 2336 Fax. 021 - 382 2139
JAKARTA

Kode Pos : 10110

BERITA ACARA KONFIRMASI SALDO KAS DAN REALISASI BELANJA

Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tia Setiawati
NIP : 198805092011012000
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Kode SKPD/UKPD : 0.19.01.00.0000.000
SKPD/UKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Telah melakukan Konfirmasi Saldo Kas per 31 Desember 2018 dan Realisasi Belanja SKPD/UKPD s/d Semester II Tahun Anggaran 2018, dengan kesimpulan sebagai berikut :

A. SALDO KAS

No.	Uraian	Saldo Kas Tutup Buku per 31 Desember 2018	Koreksi/Penyesuaian		Saldo Kas Setelah Koreksi/ Penyesuaian
			Tambah	Kurang	
1.	UP/GU	-	-	-	-
2.	TU	-	-	-	-
3.	LS	-	-	-	-
4.	Pajak yang Belum disetor	-			-
5.	Lain-lain (Jasa Giro, uang titipan)	-			-
	Jumlah	-	-	-	-

Koreksi/penyesuaian dimaksud akibat dari :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

B. REALISASI BELANJA

No.	Uraian	Realisasi Belanja Saat Tutup Buku	Koreksi/ Penyesuaian		Realisasi Belanja Setelah Koreksi/Penyeseuain
			Tambah	Kurang	
1.	UP/GU/TU	2.637.051.268		-	2.637.051.268
2.	LS	147.133.849.565	-	-	147.133.849.565
	Jumlah	149.770.900.833	-	-	149.770.900.833

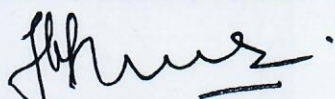


Koreksi/penyesuaian dimaksud akibat dari :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Dokumen pendukung Kelengkapan konfirmasi sebagai berikut :

NO	URAIAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA
1	Data Realisasi Belanja s/d 31 Desember 2018 (e-BKU)	✓	
2	Foto copy rekening koran per 31 Desember 2018	✓	
3	Foto copy rekening koran per 7 Januari 2019	✓	
4	Lembar Terakhir Buku Kas Umum / Form 22 per 31 Desember 2018 (e-BKU)	✓	
5	Laporan Saldo Kas Bendahara Pengeluaran (e-BKU)	✓	
6	Berita Acara Pemeriksaan Kas / Form 5† (e-BKU)	✓	
7	Rekap Pajak per 31 Desember 2018 (e-BKU)	✓	
8	Rekapitulasi Daftar Setoran LS	✓	
9	Rekapitulasi Daftar Setoran SP2D UP/GU/TU	✓	
10	Rekap Utang Belanja (Pihak Ketiga) dan Utang Pegawai	✓	
11	Utang Pajak dan TALI per 31 Desember 2018	✓	
12	Form Belanja Dibayar Dimuka atas BBM	✓	
13	Form Uang Muka Kerja	✓	
14	Form Klaim Bank Garansi	✓	
15	Form CSR dan Hibah	✓	
16	Form Penyelesaian Pekerjaan Fisik per 31 Desember 2018	✓	
17	Stock Opname Persediaan per 31 Desember 2018	✓	

Demikian Berita Acara Konfirmasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PARA PIHAK	NAMA	TANDA TANGAN
Kepala Sub Bidang Akuntansi I / II / Pelaporan	Puji Wahyudi Ode	
Pelaksana Bidang Akuntansi	Mulyadini Arti	
Bendahara Pengeluaran	Tia Setiawati	



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9
Telepon. 021 - 382 2139 - 382 2336 Fax. 021 - 382 2139
JAKARTA

Kode Pos : 10110

BERITA ACARA
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD/UKPD
PER 31 Desember 2018

Pada hari rabu tanggal 23 Januari 2019 kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : K.SULISTYAWATI
NIP : 196203271984092000
Jabatan : Pejabat Penatausahaan Keuangan
Nama SKPD/UKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Telah melakukan Penyusunan Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 bersama dengan Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan hasil yang tersaji pada laporan keuangan sebagai berikut:

LAPORAN KEUANGAN BASIS KAS

Dalam Rupiah

No	Uraian	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Laporan Perubahan SAL (LPSAL) *khusus BLUD	Laporan Arus Kas (LAK) *khusus BLUD
1	Pendapatan LRA	-		
2	Belanja	149.770.900.833		
3	Surplus/Defisit LRA (1 - 2)	- 149.770.900.833		
4	Saldo Anggaran Lebih Awal		-	
5	Surplus/Defisit		-	
6	Pembiayaan Netto		-	
7	Koreksi kesalahan SAL tahun lalu/lain-lain		-	
8	Saldo Anggaran lebih Akhir (4 + 5 + 6 +7)		-	
9	Arus Kas dari Aktivitas Operasi			-
10	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			-
11	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			-
12	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			-
13	Koreksi Saldo Awal/lain-lain			-
14	Saldo Awal Kas:			
15	- Kas di Bendahara Penerimaan			-
16	- Kas di Bendahara Pengeluaran			-
17	- Kas dan Setara Kas BLUD			-
18	Saldo Akhir Kas (9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14)			-

LAPORAN KEUANGAN BASIS AKRUAL


Dalam Rupiah

No	Uraian	Laporan Operasional (LO)	Laporan Perubahan Perubahan Ekuitas (LPE)	Neraca
1	Pendapatan LO	-		
2	Beban	142.260.842.930		
3	Surplus/Defisit LO (1 - 2)	- 142.260.842.930		
4	Ekuitas Awal		3.834.460.847	
5	Mutasi RK PPKD		149.995.317.489	
6	Koreksi Ekuitas		3.447.010	
7	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan		-	
8	Surplus/Defisit LO		142.260.842.930	
9	Ekuitas Akhir (4 + 5 + 6 + 7 + 8)		3.896.566.702	
10	Jumlah Aset			3.896.566.702
11	Jumlah Kewajiban			-
12	Jumlah Ekuitas			3.896.566.702
13	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (11 + 12)			3.896.566.702

Dokumen pendukung kelengkapan penyusunan Laporan Keuangan sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1	Rekap Beban per 31 Desember 2018		
2	Rekap Pendapatan LO per 31 Desember 2018		
3	Rekap Mutasi RK PPKD per 31 Desember 2018		
4	Rekap Koreksi Ekuitas per 31 Desember 2018		
5	Berita Acara Rekonsiliasi Belanja per 31 Desember 2018		
6	Neraca per 31 Desember 2018		
7	Laporan Operasional untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018		
8	Laporan Realisasi Anggaran Periode Tahun Anggaran 2017		
9	Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2018		
10	Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2018 (Khusus BLUD)		
11	Laporan Arus Kas per 31 Desember 2018 (Khusus BLUD)		
12	Rekap Mutasi Kas Dana BLUD (Khusus BLUD)		

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PARA PIHAK PENANDA TANGAN	NAMA	TANDA TANGAN
Kepala Bidang Akuntansi	Fatimah	
Kepala Sub Bidang Akuntansi I / II / Pelaporan	Puji Wahyudi Ode	
PPK SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Yt	K.SULISTYAWATI	
Pelaksana Bidang Akuntansi	Mulyadini Arti	
Tim Penyusun LK SKPD Penggabung	Tia Setiawati	

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

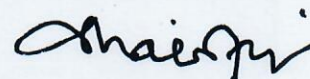
Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas		0,00	0,00
Kas di Kas Daerah		0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas dan Setara Kas BLUD		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah		0,00	0,00
Piutang Retribusi		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00
Piutang BLUD		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya		0,00	0,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Uang Muka		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Pajak		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Retribusi		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00
Penyisihan Piutang BLUD		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Lainnya		0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka		267.629,00	0,00
Beban Barang Dibayar Dimuka		267.629,00	0,00
Persediaan		416.548.848,00	402.013.477,00
Persediaan Bahan Pakai Habis		336.223.575,00	402.013.477,00
Persediaan Bahan/Material		0,00	0,00
Persediaan Barang Lainnya		80.325.273,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		416.816.477,00	402.013.477,00
ASET TETAP			
Tanah		0,00	0,00
Peralatan dan Mesin		10.560.343.878,00	8.859.955.009,00
Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(7.556.217.698,00)	(6.592.130.137,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(7.556.217.698,00)	(6.592.130.137,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap		3.004.126.180,00	2.267.824.872,00
DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA			
Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain		1.704.423.502,00	1.214.421.541,00
Aset Tetap - Rusak Berat		1.704.423.502,00	1.214.421.541,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(1.228.799.457,00)	(739.230.896,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Rusak Berat		(1.228.799.457,00)	(739.230.896,00)
Jumlah Aset Lainnya		475.624.045,00	475.190.645,00
R/K SKPD		0,00	0,00
RK SKPD Kas		0,00	0,00
RK SKPD Non Kas		0,00	0,00
JUMLAH ASET		3.896.566.702,00	3.145.028.994,00
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang Taspen		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan		0,00	0,00
Utang PPh Pusat		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang Taperum		0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai		0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Utang Belanja		0,00	6.979.489.841,00
Utang Belanja SKPD		0,00	6.979.489.841,00
Utang Belanja Pegawai		0,00	6.979.489.841,00
Utang Belanja Barang dan Jasa SKPD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal SKPD		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	6.979.489.841,00

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017 (Audited)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Luar Negeri		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	6.979.489.841,00
JUMLAH KEWAJIBAN			
		(146.098.750.787,00)	(3.834.460.847,00)
EKUITAS - LO			
RK PPKD		149.998.317.489,00	0,00
RK PPKD Kas		149.770.900.833,00	0,00
RK PPKD Non Kas		224.416.656,00	0,00
JUMLAH EKUITAS		3.896.566.702,00	(3.834.460.847,00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.896.566.702,00	3.145.028.994,00

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA, L



CH Aidir, M.Si
NIP 196608181990031000

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER				
DANA PERIMBANGAN - LO				
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Dana Perimbangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya -	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN				
Beban Pegawai	132.290.104.524,00	118.432.580.994,00	13.857.523.530,00	11,70
Beban Persediaan	738.233.938,00	620.746.461,00	117.487.477,00	18,93
Beban Barang	1.504.222.410,00	983.560.950,00	520.661.460,00	52,94
Beban Jasa	6.168.336.500,00	5.485.993.500,00	682.343.000,00	12,44
Beban Pemeliharaan	48.906.000,00	41.734.000,00	7.172.000,00	17,19
Beban Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.511.039.558,00	1.198.711.597,00	312.327.961,00	26,06
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN	142.260.842.930,00	126.763.327.502,00	15.497.515.428,00	12,23
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(142.260.842.930,00)	(126.763.327.502,00)	(15.497.515.428,00)	12,23
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON- OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEG. NON- OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(142.260.842.930,00)	(126.763.327.502,00)	(15.497.515.428,00)	12,23
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa/Beban Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(142.260.842.930,00)	(126.763.327.502,00)	(15.497.515.428,00)	12,23

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA, 1

Chaidir

CHAIDIR, M.SI
NIP 196608181990031000

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 31 DESEMBER 2018	%	REALISASI 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
1	2	3	4	5	6 = 5/4	8
4.1	PENDAPATAN DAERAH					
4.1.1	Pendapatan Asli Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisah		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Perimbangan					
4.2.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan yang Sah					
4.3.1	Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Dana Penyesuaian		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN		0,00	0,00	0,00	0,00
	BELANJA DAERAH					
	Belanja Operasi					
5.1.1	Belanja Pegawai		148.545.532.000,00	139.269.594.365,00	93,76	113.869.532.723,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa		9.594.309.972,00	8.449.102.188,00	88,06	7.089.341.675,00
5.1.3	Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Operasi		158.139.841.972,00	147.718.696.553,00	93,41	120.958.874.398,00
	Belanja Modal					
5.2.1	Belanja Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin		2.248.467.851,00	2.052.204.280,00	91,27	552.033.507,00
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Modal		2.248.467.851,00	2.052.204.280,00	91,27	552.033.507,00
	Belanja Tak Terduga					
5.3.1	Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH		160.388.309.823,00	149.770.900.833,00	93,38	121.510.907.905,00
	SURPLUS / (DEFISIT)		(160.388.309.823,00)	(149.770.900.833,00)	93,38	(121.510.907.905,00)
7.1	Penerimaan Pembiayaan					
7.1.1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.01	SILPA Dana BLUD Tahun Anggaran Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.01.01	Transfer SILPA antar BLUD		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.01.02	Koreksi SILPA BLUD		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.02	SILPA Dana APBD Tahun Anggaran Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.6	Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Pengeluaran Pembiayaan					
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Utang		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
	SILPA / (SIKPA)		(160.388.309.823,00)	(149.770.900.833,00)	93,38	(121.510.907.905,00)
	SILPA / (SIKPA) Dana BLUD			0,00		0,00
	SILPA / (SIKPA) Dana Subaidi			(149.770.900.833,00)		(121.510.907.905,00)

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA,

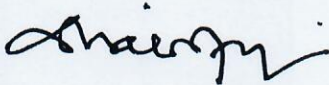
CHADIR, M.SI
NIP 196608181990031000

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
<u>Ekuitas - LO</u>			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2017 dan 2016		(125.388.247.443,00)	(547.434.400.353,00)
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		121.553.786.596,00	548.809.480.412,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2018 dan 2017		(3.834.460.847,00)	1.375.080.059,00
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2017 dan 2016		121.553.786.596,00	548.809.480.412,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(121.553.786.596,00)	(548.809.480.412,00)
RK PPKD per 1 Januari 2018 dan 2017		0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		(3.834.460.847,00)	1.375.080.059,00
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		(142.260.842.930,00)	(126.763.327.502,00)
Mutasi RK PPKD		149.995.317.489,00	121.553.786.596,00
Koreksi Ekuitas		(3.447.010,00)	0,00
Jumlah Perubahan Ekuitas		7.731.027.549,00	(5.209.540.906,00)
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		(146.098.750.787,00)	(125.388.247.443,00)
RK PPKD		149.995.317.489,00	121.553.786.596,00
EKUITAS AKHIR		3.896.566.702,00	(3.834.460.847,00)

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Provinsi DKI Jakarta, k



CHAIDIR, M.SI
NIP 196608181990031000

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH **REKAPITULASI BEBAN**

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018

JENIS BEBAN	Belanja LRA 2018 1	Penambahan 2	Pengurangan 3	NILAI BEBAN (1+2-3)
1. BEBAN PEGAWAI	139.269.594.365	-	6.979.489.841	132.290.104.524
BEBAN PEGAWAI - NON BLUD	139.269.594.365	-	6.979.489.841	132.290.104.524
<i>Ditambah :</i>				
Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2018		-		
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2017		-		
Transfer Keluar Utang Tahun 2017		-		
Belanja Pegawai Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017		-		
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Pegawai		-		
Reklasifikasi antar Beban		-		
<i>Dikurangi:</i>				
Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2017			6.979.489.841	
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2017			-	
Transfer Masuk Utang Tahun 2017			-	
Belanja Pegawai Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018			-	
Reklasifikasi antar Beban			-	
Kapitalisasi Belanja Pegawai ke Aset Tetap			-	
Koreksi Pengembalian Belanja			-	
BEBAN PEGAWAI - OPERASIONAL BLUD				
Pengesahan Belanja BLUD (SP2D Nihil)			-	
Pengeluaran Operasional BLUD Januari - Desember 2018			-	
<i>Ditambah:</i>				
Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Desember 2018		-		
Koreksi Pengesahan Belanja BLUD Tahun Anggaran 2018		-		
<i>Dikurangi:</i>				
Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Des 2017			-	
Koreksi Pengesahan Belanja BLUD Tahun Anggaran 2017			-	
2. BEBAN BARANG DAN JASA				
A. BEBAN PERSEDIAAN	753.036.938	402.013.477	416.816.477	738.233.938
Persediaan per 31 Des 2017		402.013.477		
<i>Ditambah :</i>				
Utang Belanja Persediaan per 31 Desember 2018		-		
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2017		-		
Transfer Keluar Utang Tahun 2017		-		
Belanja Persediaan Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017		-		
Reklasifikasi Belanja Modal ke Persediaan		-		
Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-lain ke Persediaan		-		
Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain		-		
Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI Jakarta		-		
Persediaan yang diperoleh dari Belanja BLUD		-		
Reklasifikasi dari Belanja Non Persediaan		-		
Hasil Perkembangbiakan untuk Diserahkan ke Pihak Lain/Dijual		-		
Kurang Catat Persediaan Awal		-		
<i>Dikurang :</i>				
Kapitalisasi Belanja Persediaan ke Aset Tetap / Lain-lain		-		
Reklasifikasi Persediaan Awal ke Aset Tetap/ Lain-lain		-		
Utang Belanja Persediaan per 31 Desember 2017		-		
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2017		-		
Transfer Masuk Utang Tahun 2017		-		
Belanja Persediaan Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018		-		
Transfer Keluar Persediaan ke SKPD Lain			267.629	
Reklasifikasi Belanja Persediaan ke Beban Non Persediaan			-	
Persediaan Awal yang Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga			-	
Lebih Catat Persediaan Awal			-	
Koreksi Beban Persediaan Menjadi Uang Muka			-	
Koreksi Pengembalian Belanja			-	
Persediaan per 31 Desember 2018			416.548.848	
B. BEBAN BARANG	1.478.822.750	25.399.660	-	1.504.222.410
BEBAN BARANG - NON BLUD	1.478.822.750	25.399.660	-	1.504.222.410
<i>Ditambah:</i>				
Utang Belanja Barang per 31 Desember 2018		-		
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2017		-		
Transfer Keluar Utang Tahun 2017		-		
Belanja Barang Dibayar di Muka per 31 Desember 2017		-		
Reklasifikasi dari Belanja Non Barang		-		
Persediaan Awal yang Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga		-		
Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-lain ke Ekstrakomtabel		-		
<i>Dikurang:</i>				
Kapitalisasi Belanja Barang ke Aset Tetap/Lain-lain		-		
Utang Belanja Barang per 31 Desember 2017		-		
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2017		-		
Transfer Masuk Utang Tahun 2017		-		
Belanja Barang Dibayar di Muka per 31 Desember 2018		-		
Persediaan Akhir dari Barang Yang Belum Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga		-		
Reklasifikasi Belanja Barang ke Beban Non Barang		-		
Koreksi Beban Barang Menjadi Uang Muka		-		
Koreksi Pengembalian Belanja		-		
BEBAN BARANG - OPERASIONAL BLUD				
Pengesahan Belanja BLUD (SP2D Nihil)			-	
Pengeluaran Operasional BLUD Januari - Desember 2018			-	

JENIS BEBAN	Belanja LRA 2018 1	Penambahan 2	Pengurangan 3	NILAI BEBAN (1+2-3)
Dikurangi: Utang Belanja BLUD per 31 Des 2017 Utang Kepada Pihak Ketiga BLUD per 31 Des 2017 Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2017 Kapitalisasi Belanja Barang BLUD ke Aset Tetap/Lain-lain Persediaan yang diperoleh dari Belanja BLUD Transfer Masuk Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Belanja Barang Dibayar di Muka per 31 Desember 2018 Koreksi Pengesahan Belanja BLUD Tahun Anggaran 2017 Ditambah: Koreksi Pengesahan Belanja BLUD Tahun Anggaran 2018 Utang Belanja BLUD per 31 Desember 2018 Utang Kepada Pihak Ketiga BLUD per 31 Desember 2018 Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2017 Transfer Keluar Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Barang BLUD				
C. BEBAN JASA	6.168.336.500	-	-	6.168.336.500
Ditambah : Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2018 Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2017 Transfer Keluar Utang Tahun 2017 Belanja Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Jasa Reklasifikasi antar Beban Dikurangi: Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2017 Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2017 Transfer Masuk Utang Tahun 2017 Belanja Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 Reklasifikasi antar Beban Kapitalisasi Belanja Jasa ke Aset Tetap Koreksi Beban Jasa Menjadi Uang Muka Koreksi Pengembalian Belanja				
D. BEBAN PEMELIHARAAN	48.906.000	-	-	48.906.000
Ditambah : Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2018 Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2017 Transfer Keluar Utang Tahun 2017 Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan Reklasifikasi antar Beban Dikurangi: Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2017 Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2017 Transfer Masuk Utang Tahun 2017 Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 Reklasifikasi antar Beban Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap Koreksi Beban Pemeliharaan Menjadi Uang Muka Koreksi Pengembalian Belanja				
E. BEBAN PERJALANAN DINAS				
Ditambah : Utang Belanja Perjalanan Dinas per 31 Desember 2018 Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2017 Transfer Keluar Utang Tahun 2017 Belanja Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 Reklasifikasi antar Beban Dikurangi: Utang Belanja Perjalanan Dinas per 31 Desember 2017 Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2017 Transfer Masuk Utang Tahun 2017 Belanja Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 Reklasifikasi antar Beban Koreksi Pengembalian Belanja				
TOTAL BEBAN BARANG DAN JASA (B + C + D + E)				8.459.698.848
3. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		1.511.039.558	-	1.511.039.558
a. Peralatan dan Mesin		1.511.039.558	-	1.511.039.558
b. Gedung dan Bangunan		-	-	-
c. Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-
d. Aset Tetap Lainnya		-	-	-
e. Aset Tidak Berwujud		-	-	-
f. Aset Lainnya		-	-	-
4. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG				
5. BEBAN HIBAH				
Belanja Modal 2018 yang Diserahkan ke Pihak Lain/Masyarakat/Personel				
Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD (Selain Belanja Modal 2018)				
6. BEBAN LAIN-LAIN				
a. ...				
b. ...				
				142.260.842.930

Bendahara Pengeluaran
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Provinsi DKI Jakarta,

TIA SETIAWATI

Pejabat Penatausahaan Keuangan
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Provinsi DKI Jakarta,

K. SITI SETIAWATI

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
REKAPITULASI PENDAPATAN LO**

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018

JENIS PENDAPATAN	Pendapatan IRA SKPD / Perfektifitas Pendapatan BLUD	Penambahan	Pengurangan	NILAI PENDAPATAN LO (2+3-4)
SKPD				
1. PENDAPATAN PAJAK				
<i>Penambahan :</i>				
Piutang Per 31 Desember 2018				
Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2017				
Pendapatan Belum Disetor per 31 Desember 2018				
Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2017				
Transfer Keluar Piutang Tahun 2017 ke SKPD Lain				
Koreksi Kurang Catat Lainnya				
<i>Pengurangan:</i>				
Piutang per 31 Des 2017				
Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2018				
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2017				
Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2017				
Transfer Masuk Piutang Tahun 2017 dari SKPD Lain				
Koreksi Kurang Catat Lainnya				
2. PENDAPATAN RETRIBUSI				
<i>Penambahan :</i>				
Piutang Per 31 Desember 2018				
Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2017				
Pendapatan Belum Disetor per 31 Desember 2018				
Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2017				
Transfer Keluar Piutang Tahun 2017 ke SKPD Lain				
<i>Pengurangan:</i>				
Piutang per 31 Des 2017				
Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2018				
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2017				
Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2017				
Transfer Masuk Piutang Tahun 2017 ke SKPD Lain				

JENIS PENDAPATAN	Pendapatan IRA SKPD/ Penyertaan Pendapatan BLUD	Penambahan	Pengurangan	NILAI PENDAPATAN ILO (Rmb.0)
3. PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	-	-	-	-
<i>Penambahan :</i>				
Piutang Per 31 Desember 2018	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2017	-	-	-	-
Pendapatan Belum Disetor per 31 Desember 2018	-	-	-	-
Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2017	-	-	-	-
Transfer Keluar Piutang Tahun 2017 ke SKPD Lain	-	-	-	-
<i>Pengurangan:</i>				
Piutang per 31 Des 2017	-	-	-	-
Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2018	-	-	-	-
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2017	-	-	-	-
Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2017	-	-	-	-
Transfer Masuk Piutang Tahun 2017 ke SKPD Lain	-	-	-	-
4. LAIN-LAIN PAD	-	-	-	-
<i>Penambahan :</i>				
Piutang Per 31 Desember 2018	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2017	-	-	-	-
Pendapatan Belum Disetor per 31 Desember 2018	-	-	-	-
Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2017	-	-	-	-
Transfer Keluar Piutang Tahun 2017 ke SKPD Lain	-	-	-	-
Koreksi Kurang Catat Lainnya	-	-	-	-
<i>Pengurangan:</i>				
Piutang per 31 Des 2017	-	-	-	-
Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2018	-	-	-	-
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2017	-	-	-	-
Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2017	-	-	-	-
Transfer Masuk Piutang Tahun 2017 ke SKPD Lain	-	-	-	-
Koreksi Lebih Catat Lainnya	-	-	-	-
BLUD				
4. LAIN-LAIN PAD - IRA	-	-	-	-
LAIN-LAIN PAD - BLUD	-	-	-	-
<i>Penambahan :</i>				
Piutang Per 31 Desember 2018	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2017	-	-	-	-
Pendapatan Belum Disetor per 31 Desember 2018	-	-	-	-
Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2017	-	-	-	-
Transfer Keluar Piutang Tahun 2017 ke SKPD Lain	-	-	-	-
Koreksi Penambahan Lainnya	-	-	-	-

JENIS PENDAPATAN	Pendapatan IRA SKPD/ Penerimaan Pendapatan BLUD	Penambahan	Pengurangan	NIDAI PENDAPATAN LO (2, 3 + 4)
Pengurangan:				
Piutang per 31 Des 2017			-	
Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2018			-	
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2017			-	
Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2017			-	
Transfer Masuk Piutang Tahun 2017 ke SKPD Lain			-	
5. PENDAPATAN HIBAH			-	
Penambahan :				
Donasi/Hibah Aset Tetap Dari Luar Provinsi DKI Jakarta				
Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI Jakarta				
Pengurangan:				
Akumulasi Penyusutan Aset Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta			-	

Bendahara Penerimaan
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Provinsi DKI Jakarta,

Pejabat Penatausahaan Keuangan
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Provinsi DKI Jakarta,



K.SULISTYAWATI
NIP 196203271984092000

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
MUTASI RK PPKD

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018

Keterangan	Penambahan	Pengurangan	Nilai
RK - PPKD Per 1 Januari 2018	-	-	-
RK PPKD Per 1 Januari 2018	-	-	-
Mutasi Tambah:			
Utang Restitusi Pajak per 31 Desember 2017	-	-	-
Mutasi Kurang:			
Sisa UP/GU/TU/LS TA 2017 yang Disetor Tahun 2018	-	-	-
Jasa Giro di SKPD tahun 2017 yang Disetor di Tahun 2018	-	-	-
Setoran atas Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak	-	-	-
RK PPKD - KAS	149.770.900.833	-	149.770.900.833
Mutasi Tambah:			
Realisasi Belanja per 31 Desember 2018	149.770.900.833	-	-
Sisa UP/GU TA 2018 yang Belum Disetor per 31 Desember 2018	-	-	-
Sisa TU TA 2018 yang Belum Disetor per 31 Desember 2018	-	-	-
Sisa LS TA 2018 yang Belum Disetor per 31 Desember 2018	-	-	-
Piutang Kelebihan Penyetoran Pajak per 31 Desember 2018	-	-	-
Penambahan Kas BLUD yang Diterima setelah Pembubaran	-	-	-
Penerimaan Saldo Kas Pembubaran SKPD	-	-	-
Jasa Giro di SKPD TA 2018 yang Belum Disetor per 31 Desember 2018	-	-	-
Penyesuaian Pendapatan/Piutang			
Transfer Masuk Piutang Tahun 2017 dari SKPD Lain	-	-	-
Transfer Keluar Penyisihan Piutang Tahun 2017 ke SKPD Lain	-	-	-
Penyesuaian Utang			
Transfer Keluar Utang Tahun 2017	-	-	-
Transfer Kas BLUD karena Perubahan SOTK	-	-	-
Mutasi Kurang:			
Pendapatan - LRA per 31 Desember 2018	-	-	-
Setoran Kas Pembubaran SKPD/BLUD	-	-	-
Utang Restitusi Pajak per 31 Desember 2018	-	-	-
Koreksi Pengembalian Belanja	-	-	-
Koreksi Jasa Giro SKPD	-	-	-
Penyesuaian Piutang			
Transfer Keluar Piutang Tahun 2017 ke SKPD Lain	-	-	-
Transfer Masuk Penyisihan Piutang Tahun 2017 dari SKPD Lain	-	-	-
Penyesuaian Utang			
Transfer Masuk Utang Tahun 2017	-	-	-
Transfer Kas BLUD karena Perubahan SOTK	-	-	-
RK PPKD - NON KAS	1.156.186.906	931.770.250	224.416.656
Mutasi Tambah:			
Penambahan Aset Tetap & Lain-lain			
Transfer Masuk dari SKPD Lain	1.046.600.000	-	-
Hasil Tukar Guling	-	-	-
Koreksi Kurang Catat Transfer Masuk dari SKPD Lain (Tahun 2015)	-	-	-
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi:			
Akumulasi Penyusutan Aset yang Dihapuskan	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset yang Ditransfer Keluar ke SKPD Lain	109.586.906	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Aset Tetap Yang Ditukar Guling/Ruislag	-	-	-
Penyesuaian Persediaan			

Keterangan	Penambahan	Pengurangan	Nilai
Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain			
Mutasi Kurang:			
Pengurangan Aset Tetap & Lain-Lain			
Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya			
Transfer Keluar ke SKPD Lain		876.695.250	
Koreksi Kurang Catat Transfer Keluar dari SKPD Lain (Tahun 2015)			
Aset Tetap Yang Ditukar Guling/Ruislag			
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi:			
Akumulasi Penyusutan Aset Transfer Masuk dari SKPD Lain		55.075.000	
Akumulasi Penyusutan Aset Hasil Tukar Guling			
Penyesuaian Persediaan			
Transfer Keluar Persediaan ke SKPD Lain			
Penyesuaian Lainnya			
Penyelesaian Piutang KLB/KDB			
MUTASI RK PPKD			149.995.317.489
RK PPKD PER 31 Desember 2018			149.995.317.489

Pejabat Penatausahaan Keuangan
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 ✕ Provinsi DKI Jakarta,



K.SULISTYAWATI
 NIP 196203271984092000

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
REKAPITULASI KOREKSI EKUITAS

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018

DEBIT - KOREKSI PENGURANG		KREDIT - KOREKSI PENAMBAH	
Keterangan	Nilai	Keterangan	Nilai
Koreksi Pengurangan Aset Tetap dan Aset Lainnya		Koreksi Penambahan Aset Tetap dan Aset Lainnya	
Koreksi Lebih Catat Barang Aset Tetap dan Aset Lainnya	-	Koreksi Kurang Catat Barang Aset Tetap dan Aset Lainnya	
Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya	-	Koreksi Kurang Catat Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya	
Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2017 atas Temuan	-	Koreksi Kurang Catat Transfer Masuk dari SKPD Lain (Sebelum Tahun 2015)	
Koreksi Kurang Catat Transfer Keluar dari SKPD Lain (Sebelum Tahun 2015)	-		
Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel	6.318.540		
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi		Penyesuaian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	
Koreksi Kurang Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/ Koreksi Kurang Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	-	Koreksi Lebih Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/ Koreksi Lebih Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	6
Koreksi Kurang Catat Transfer Masuk dari SKPD Lain (Sebelum Tahun 2015)	-	Koreksi Belanja Modal atas Temuan, klaim Bank Garansi dan Koreksi Lainnya, Denda, dsb	-
		Koreksi Kurang Catat Transfer Keluar dari SKPD Lain (Sebelum Tahun 2015)	-
		Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel	2.871.524
Penyesuaian Persediaan		Penyesuaian Persediaan	
Lebih Catat Persediaan Awal	-	Kurang Catat Persediaan Awal	-
Penyesuaian Pendapatan		Penyesuaian Pendapatan	
Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2017	-	Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2017	-
Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang Tahun 2017	-	Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang Tahun 2017	-
		Koreksi Kurang Catat Lainnya	-
		Penyisihan atas Piutang yang terbayar/Pembatalan Penyisihan Piutang	-
Penyesuaian Utang		Penyesuaian Utang	
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2017	-	Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2017	-
		Penilaian kembali Utang Jangka Panjang BLUD	-
Penyesuaian Kas BLUD		Penyesuaian Lainnya	
Koreksi Saldo Awal Kas BLUD	-	Pembatalan Kesepakatan Pengadaan Transjakarta	-
Setoran Kas Pembubaran SKPD/BLUD	-	Hasil Perikembangbiakan untuk Diserahkan ke Pihak Lain/Dijual	-
Penyesuaian Lainnya			
Koreksi Kurang Catat Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2017	-		
Koreksi Kas Konsinyasi	-		
JUMLAH KOREKSI PENGURANGAN	6.318.540	JUMLAH KOREKSI PENAMBAHAN	2.871.524
		JUMLAH KOREKSI EKUITAS	3.447.010

Pejabat Penatausahaan Keuangan
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Provinsi DKI Jakarta,



K.SULISTYAWATI
NIP. 196203271984092000



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENGELOLA ASET DAERAH
Jl. Abdul Muis No. 66, Jakarta Pusat
JAKARTA

BERITA ACARA REKONSILIASI ASET
TAHUN 2018

Pada hari ini, Selasa, tanggal 15 bulan Januari Tahun 2019, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KHAIRUDDIN
NIP : 198705312011011011
Jabatan : Pengurus Barang
Kode SKPD : 01901000000000
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Telah melakukan Rekonsiliasi Aset Tetap per 31 Desember 2018 dengan kesimpulan sebagai berikut :

No	Rekening	Saldo Per 31 Desember 2017 (Audited)	Penambahan Tahun 2018	Pengurangan Tahun 2018	Saldo per 31 Desember 2018	Keterangan
I	Aset Tetap					
1.	Tanah	0	0	0	0	
2.	Peralatan dan Mesin	8,859,955,009	3,098,804,280	1,398,415,411	10,560,343,878	
3.	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0	
5.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	0	0	
	Total Aset Tetap	8,859,955,009	3,098,804,280	1,398,415,411	10,560,343,878	
II	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap					
7.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6,592,130,137)	(1,566,114,558)	(602,026,997)	(7,556,217,698)	
8.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	(0)	(0)	(0)	
9.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	(0)	(0)	(0)	
10.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	(0)	(0)	(0)	
	Total Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6,592,130,137)	(1,566,114,558)	(602,026,997)	(7,556,217,698)	
III	Aset Lain-Lain					
11.	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0	
12.	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	(0)	(0)	(0)	
13.	Aset Rusak Berat	1,214,421,541	490,001,961	0	1,704,423,502	
14.	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(739,230,896)	(489,568,561)	(0)	(1,228,799,457)	
15.	Aset Belum Validasi	0	0	0	0	
16.	Aset Yang Belum Ditetapkan Statusnya	0	0	0	0	
17.	Akumulasi Penyusutan Aset Yang Belum Ditetapkan Statusnya	0	0	0	0	
18.	Aset Fasos Fasum	0	0	0	0	
19.	Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum	0	0	0	0	
20.	Kas Dikonsumsi	0	0	0	0	
21.	Aset Kerjasama Operasi (KSO)	0	0	0	0	
22.	Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Operasi (KSO)	0	0	0	0	
23.	Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (BOT)	0	0	0	0	
24.	Akumulasi Penyusutan BOT	0	0	0	0	



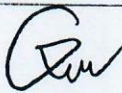
III	Aset Lain-Lain (lanjutan)				
25.	Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (BTO)	0	0	0	0
26.	Akumulasi Penyusutan BTO	0	0	0	0
27.	Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	0	0	0	0
28.	Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yang Disewakan	0	0	0	0
Total Aset Lain-Lain		475,190,646	433,400	0	475,624,046
Total Nilai Buku Aset Tetap + Aset Lain-Lain		2,743,016,617	1,633,123,122	796,388,414	3,479,750,226

Catatan :

Dokumen pendukung kelengkapan rekonsiliasi aset tetap sebagai berikut :

No	URAIAN	KETERANGAN
1.	KIB per 31 Desember 2018 (Hardcopy)	
2.	Daftar Aset Lainnya (Hardcopy)	
3.	BAST atas Transfer dan Hibah	
4.	SK Penghapusan	
5.	SK Penggunaan	
6.	Surat Pernyataan Koreksi	
7.	Daftar KDP	
8.	Daftar Penerimaan Aset CSR	
9.	Stock Opname Persediaan per 31 Desember 2018	

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Aset ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PELAKSANA REKONSILIASI ASET TETAP		NAMA DAN NIP.	TANDA TANGAN
1.	Kepala Subbidang Inventarisasi	NIP. IRFAN SYAH KUALA 198201302011011004	
2.	Petugas Rekon	Ligan NIP. 198503012011011010	
3.	Pengurus Barang SKPD :	KHAIRUDDIN NIP. 198705312011011011	

Item No.	Description	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Public Procurement Services
 Makindia District Office
 P.O. Box 100
 Makindia
 Kenya
 Tel: 020 2770000
 Fax: 020 2770001
 Email: info@ppsc.co.ke

Makindia District Office
 P.O. Box 100
 Makindia
 Kenya
 Tel: 020 2770000
 Fax: 020 2770001
 Email: info@ppsc.co.ke